

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA  
MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING  
(STUDI PADA EKS-KARISIDENAN  
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015)**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**ANGGORO ABDURRAHMAN TAUFIQ  
NIM. 12020112130083**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2017**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Anggoro Abdurrahman Taufiq  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130083  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA  
ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN  
ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA  
EKS-KARISIDENAN DI PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2010-2015)**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Miyasto, SU.

Semarang, 11 Maret 2017

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. H. Miyasto, SU)

NIP. 195012251975011001

## PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Anggoro Abdurrahman Taufiq  
Nomor Induk Mahasiswa : 12020112130083  
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/IESP  
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH,  
DANA ALOKASI UMUM DAN DANA  
ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN  
ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI  
VARIABEL INTERVENING (STUDI PADA  
EKS-KARISIDENAN DI PROVINSI JAWA  
TENGAH TAHUN 2010-2015)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 24 Maret 2017**

Tim Penguji:

1. Prof. Dr. H. Miyasto, SU (.....)
2. Akhmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si, Ph.D (.....)
3. Darwanto, S.E., M.Si (.....)

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Anis Chariri, S.E., M.Com., Ph.D., Akt  
NIP. 196708091992031001

## **PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Anggoro Abdurrahman Taufiq, menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Eks-Karisidenan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015) adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 11 Maret 2017

Yang Membuat Pernyataan,

(Anggoro Abdurrahman Taufiq)

NIM. 12020112130083

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan” (QS. Al-Fatihah : 5)

*“Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawana”* (Falsafah Jawa)

*“To accomplish great things, we must not only act, but also dream; not only plan, but also believe”* (Anatole France)

Skripsi ini saya persembahkan untuk Bapak dan Ibu, Adik, serta orang-orang yang telah mendukung saya

## **ABSTRACT**

*Human capital is one of the important towards to a better economic development. Aside from being an object, human is one of subject in development goals, in this case measured by human development index. The result of human development index in Central Java is still relatively low, with fifth out of six provinces in Java. Fiscal decentralization policy requires local independence in manage revenue and expenditures.*

*The goals of this study was to analyze the effect of local revenue (PAD), the general allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK) to capital expenditures (BM), and the effect of capital expenditure (BM) to human development index (HDI). The data used is secondary data. The analytical method used in this research is Ordinary Least Square (OLS) with fixed effect approach. The data used is data panel 2010-2015.*

*The first results showed that the variable PAD have a positive significant effect on BM in all residency. The variable DAU have a positive significant effect on BM in Banyumas residency, Surakarta residency, and Semarang residency, while in Kedu residency and Pekalongan residency have a positive not significant, and in Pati residency havea negative not significant. The variabel DAK have a positive significant on BM in Pekalongan residency, Surakarta residency, and Semarang residency, while in Kedu residency and Pati residency have a positive not significant, and in Banyumas residency have a negative significant. The second result that BM have a positive effect on HDI in all residency.*

*Keyword: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Local Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditures.*

## ABSTRAK

Manusia merupakan salah satu modal penting menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik. Selain sebagai objek, manusia juga merupakan salah satu subjek dalam tujuan pembangunan, dalam hal ini diukur dari indeks pembangunan manusia. Hasil indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah masih tergolong rendah. Peran Pemerintah diperlukan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang dapat digambarkan melalui nilai IPM yang meningkat, dengan mengelola pendapatan dan belanja daerah secara tepat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal (BM), dan pengaruh belanja modal (BM) terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Musgrave-Rostow, Hukum Wagner, serta Teori Erick Lindahl. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Ordinary Least Square* (OLS) dengan pendekatan efek tetap. Data yang digunakan adalah data panel tahun 2010-2015, di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

Temuan pertama menunjukkan bahwa variabel PAD berpengaruh positif signifikan terhadap BM di semua eks-Karisidenan, sedangkan variabel DAU dan DAK memiliki pengaruh yang bervariasi pada setiap eks-Karisidenan. Temuan kedua menunjukkan bahwa variabel BM berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di semua eks-Karisidenan.

**Kata Kunci:** Indeks Pembangunan Manusia, Desentralisasi Fiskal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya serta shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Eks-Karisidenan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015). Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Akhmad Syakir Kurnia, S.E, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Bapak Prof. Dr. H. Miyasto, SU. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segala waktu, tenaga, perhatian, arahan, serta kesabaran dalam membimbing penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si. selaku dosen wali yang telah membantu dan memberikan motivasi selama perkuliahan.
5. Seluruh dosen FEB Undip yang telah memberikan segala waktu dan pengetahuan, serta seluruh staff dan karyawan FEB Undip yang telah

membantu memberikan pelayanan yang berguna bagi penulis selama masa studi penulis.

6. Kepada kedua orang tua, Bapak Bambang Eko Suratmoko, S.H. dan Ibu Dra. Arina Tri Lunggani, M.Si. serta kedua adikku Kemal Arif Rahman dan Satrio Hanif Ibrahim yang selalu memberikan doa, motivasi, serta semangat kepada penulis.
7. Ria Indriastuti, terimakasih atas segala waktu, kesabaran, motivasi, serta canda tawa yang telah diberikan dalam menemani penulis selama mengerjakan skripsi.
8. Sahabat selama perkuliahan, Arul, Ricko, Samuel, Sindhu, Wisnu, Fadhil, Dio, Syihab, Pandu, Agha, Danny. Terimakasih atas segala bantuan, canda tawa, serta motivasi selama perkuliahan.
9. Terimakasih kepada Alan, Tio dan Ariski yang senantiasa bersedia membantu berdiskusi kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
10. Keluarga besar IESP 2012, terimakasih atas kerjasama, serta kebersamaannya selama masa perkuliahan. Semoga kesuksesan selalu mengiringi kita.
11. Seluruh pihak yang telah membantu dan teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat diucapkan satu persatu.

Penulis menyadari bawah skripsi ini masih terdapat keterbatasan, namun penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak.

Semarang, 11 Maret 2017

Penulis,

Anggoro Abdurrahman Taufiq

NIM. 1202021130083

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 <i>Research Gap</i> .....	22
1.3 Rumusan Masalah .....	29
1.4 Tujuan dan Kegiatan Penelitian.....	30
1.5 Sistematika Penulisan.....	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	33
2.1 Landasan Teori .....	33
2.1.1 Peran Pemerintah.....	33
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	36
2.1.3. Penerimaan Pemerintah Daerah.....	39
2.1.4 Pengeluaran Pemerintah .....	47
2.1.5 Pengeluaran Belanja Modal.....	54
2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia .....	57
2.2 Penelitian Terdahulu.....	61
2.3 Kerangka Pemikiran.....	73
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	74
2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal .....	74
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal .....	76
2.4.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal .....	77
2.4.4 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	78
BAB III METODE PENELITIAN.....	79
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel.....	79
3.1.1 Variabel Penelitian .....	79
3.1.2 Definisi Operasional .....	79
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	80
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	81

3.4 Metode Analisis Data .....	81
3.4.1 Estimasi Model Regresi.....	83
3.4.2 Analisis Data Panel.....	95
3.5 Uji Asumsi Klasik .....	96
3.5.1. Uji Normalitas .....	96
3.5.2 Uji Multikolinearitas .....	96
3.5.3 Uji Autokorelasi.....	97
3.5.4 Uji Heteroskedastisitas .....	97
3.6 Uji Signifikansi .....	98
3.6.1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	98
3.6.2 Uji Simultan (Uji F).....	99
3.6.3 Uji Statistik (Uji t) .....	99
3.7 Uji <i>Chow-Test</i> .....	100
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	103
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	103
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	103
4.1.2 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah .....	105
4.1.2 Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Jawa Tengah .....	118
4.1.3 Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.....	130
4.1.4 Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah .....	142
4.1.5 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah	155
4.2 Hasil Deteksi Asumsi Model Klasik .....	168
4.2.1 Deteksi Normalitas .....	168
4.2.2 Deteksi Multikolinearitas .....	172
4.2.3 Deteksi Autokorelasi .....	176
4.2.4 Deteksi Heteroskedastisitas .....	181
4.3 Hasil Uji Statistik Regresi .....	186
4.3.1 Analisis Hasil Regresi.....	186
4.3.2 Koefisien Determinasi (Uji $R^2$ ) .....	192
4.3.3 Uji Statistik Simultan (Uji F).....	198
4.3.4 Uji Signifikansi (Uji t).....	202
4.3.5 Uji Chow .....	208
4.4 Interpretasi Hasil dan Pembahasan .....	219
4.4.1 Regresi Tahap Pertama .....	219
4.4.2 Regresi Tahap Kedua.....	232
4.4.3. Pengaruh Variabel <i>Dummy</i> Wilayah Terhadap Belanja Modal .....	237
4.4.4 Pengaruh Variabel <i>Dummy</i> Wilayah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia.....	241
BAB V PENUTUP.....	246
5.1 Kesimpulan .....	246
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	248

5.3 Saran.....	249
DAFTAR PUSTAKA .....	251
LAMPIRAN .....	254

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ratio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-Negara ASEAN Tahun 2010-2014.....	3
Tabel 1.2	10 Provinsi di Indonesia dengan IPM Tertinggi Tahun 2015.....	6
Tabel 1.3	Perkembangan Angka Indeks Pembangunan Manusia Antar Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2010-2015.....	7
Tabel 1.4	Human Development Index (HDI) Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2015...9	
Tabel 1.5	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah) .....	14
Tabel 1.6	Laporan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah).....	21
Tabel 1.7	<i>Research Gap</i> .....	25
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	66
Tabel 4.1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Banyumas Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	107
Tabel 4.2	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Kedu Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	109
Tabel 4.3	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pati Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	111
Tabel 4.4	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pekalongan Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	113
Tabel 4.5	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Surakarta Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	115
Tabel 4.6	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Semarang Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	117
Tabel 4.7	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Banyumas Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	119
Tabel 4.8	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Kedu Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	121
Tabel 4.9	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pati Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	123
Tabel 4.10	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pekalongan Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	125
Tabel 4.11	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Surakarta Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	127
Tabel 4.12	Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Semarang Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	129
Tabel 4.13	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Banyumas	

	Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	131
Tabel 4.14	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Kedu Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	133
Tabel 4.15	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pati Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	135
Tabel 4.16	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pekalongan Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah).....	137
Tabel 4.17	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Surakarta Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	139
Tabel 4.18	Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Semarang Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	141
Tabel 4.19	Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Banyumas Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	144
Tabel 4.20	Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Kedu Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	146
Tabel 4.21	Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pati Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	148
Tabel 4.22	Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pekalongan Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah).....	150
Tabel 4.23	Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Surakarta Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	152
Tabel 4.24	Pengeluaran Belanja Modal Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Semarang Tahun 2010-2015 (dalam Jutaan Rupiah) .....	154
Tabel 4.25	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Banyumas Tahun 2010-2015.....	157
Tabel 4.26	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Kedu Tahun 2010-2015.....	159
Tabel 4.27	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pati Tahun 2010-2015.....	161
Tabel 4.28	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Pekalongan Tahun 2010-2015.....	163
Tabel 4.29	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Surakarta Tahun 2010-2015.....	165
Tabel 4.30	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota eks-Karisidenan Semarang Tahun 2010-2015.....	167
Tabel 4.31	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	168
Tabel 4.32	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	169
Tabel 4.33	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	169
Tabel 4.34	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	169
Tabel 4.35	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	170
Tabel 4.36	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	170

Tabel 4.37	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	170
Tabel 4.38	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	171
Tabel 4.39	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	171
Tabel 4.40	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	171
Tabel 4.41	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	172
Tabel 4.42	Hasil Uji Deteksi Normalitas.....	172
Tabel 4.43	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	173
Tabel 4.44	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	173
Tabel 4.45	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	173
Tabel 4.46	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	174
Tabel 4.47	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	174
Tabel 4.48	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	174
Tabel 4.49	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	175
Tabel 4.50	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	175
Tabel 4.51	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	175
Tabel 4.52	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	176
Tabel 4.53	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	176
Tabel 4.54	Hasil Uji Deteksi Multikolinearitas.....	176
Tabel 4.55	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	177
Tabel 4.56	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	177
Tabel 4.57	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	178
Tabel 4.58	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	178
Tabel 4.59	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	178
Tabel 4.60	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	179
Tabel 4.61	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	179
Tabel 4.62	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	180
Tabel 4.63	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	180
Tabel 4.64	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	180
Tabel 4.65	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	181
Tabel 4.66	Hasil Uji Deteksi Autokorelasi.....	181
Tabel 4.67	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	182
Tabel 4.68	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	182
Tabel 4.69	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	182
Tabel 4.70	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	183
Tabel 4.71	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	183
Tabel 4.72	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	184
Tabel 4.73	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	184
Tabel 4.74	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	185
Tabel 4.75	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	185
Tabel 4.76	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	185
Tabel 4.77	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	186

Tabel 4.78	Hasil Uji Deteksi Heteroskedastisitas.....	186
Tabel 4.79	Hasil Regresi Persamaan Belanja Modal.....	187
Tabel 4.80	Hasil Regresi Persamaan Belanja Modal.....	187
Tabel 4.81	Hasil Regresi Persamaan Belanja Modal.....	188
Tabel 4.82	Hasil Regresi Persamaan Belanja Modal.....	188
Tabel 4.83	Hasil Regresi Persamaan Belanja Modal.....	189
Tabel 4.84	Hasil Regresi Persamaan Belanja Modal.....	189
Tabel 4.85	Hasil Regresi Persamaan Indeks Pembangunan Manusia.....	190
Tabel 4.86	Hasil Regresi Persamaan Indeks Pembangunan Manusia.....	190
Tabel 4.87	Hasil Regresi Persamaan Indeks Pembangunan Manusia.....	190
Tabel 4.88	Hasil Regresi Persamaan Indeks Pembangunan Manusia.....	191
Tabel 4.89	Hasil Regresi Persamaan Indeks Pembangunan Manusia.....	191
Tabel 4.90	Hasil Regresi Persamaan Indeks Pembangunan Manusia.....	192
Tabel 4.91	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	192
Tabel 4.92	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	193
Tabel 4.93	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	193
Tabel 4.94	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	194
Tabel 4.95	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	194
Tabel 4.96	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	195
Tabel 4.97	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	195
Tabel 4.98	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	196
Tabel 4.99	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	196
Tabel 4.100	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	196
Tabel 4.101	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	197
Tabel 4.102	Hasil Regresi Uji $R^2$ .....	197
Tabel 4.103	Uji Chow.....	208
Tabel 4.104	Uji Chow.....	212

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Antar Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah).....	13
Gambar 1.2 Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah).....	15
Gambar 1.3 Perkembangan PAD, DAU, DAK terhadap Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah).....	17
Gambar 1.4 Perkembangan Belanja Rutin dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah).....	20
Gambar 2.1 Pengeluaran Pemerintah dan Pembangunan Manusia .....	49
Gambar 2.2 Pengeluaran Pemerintah menurut Hukum Wagner.....	53
Gambar 2.3 Kurva Indiferens .....	54
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran .....	73
Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Tengah .....	103

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data Variabel Penelitian.....	254
Lampiran B	Hasil Regresi Penelitian.....	258
Lampiran C	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	264
Lampiran D	Hasil Uji Chow.....	290

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu modal penting menuju pembangunan ekonomi yang lebih baik. Selain sebagai objek, manusia juga merupakan salah satu subjek dalam tujuan pembangunan. Dalam amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bernegara yaitu “memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal itu kemudian ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 tertuang upaya peningkatan kesehatan, pemenuhan pendidikan universal, dan pemberantasan kemiskinan.

Peningkatan sumber daya manusia mempunyai makna peningkatan kapasitas dasar penduduk, sehingga dapat memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Maka, pembangunan manusia menjadi sentral sebab pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu dapat memecahkan persoalan kesejahteraan masyarakat (*trickle down effect*). Teori pertumbuhan baru yang berkembang menekankan pentingnya peranan Pemerintah terhadap pembangunan manusia (*human capital*) (Ginting, 2008). Peningkatan modal manusia dapat diperlihatkan dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan seseorang. Peningkatan tersebut akan mampu

meningkatkan *value added* individu sehingga diharapkan perkembangan ekonomi dapat berjalan lebih baik.

Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index* (HDI) hadir sebagai salah satu cara untuk mengukur keberhasilan kinerja suatu negara. Indeks ini pertama kali dikembangkan oleh *Amartya Sen*, seorang pemenang nobel dari India dan *Mahbub ul Haq*, seorang ekonom dari Pakistan yang dibantu oleh *Lord Meghnad Desai* dari *London School of Economics* dan *Gustav Ranis* dari *Yale University* (Todaro, 2011).

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai “*a process of enlarging people’s choice*” atau suatu proses yang meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Aspek terpenting kehidupan ini dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan yang memadai serta standar hidup layak. Secara spesifik, *United Development Programme* (UNDP) menetapkan empat elemen utama dalam pembangunan manusia, yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*) (Ardiansyah & Widyaningsih, 2014).

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indeks komposit berdasarkan tiga indikator yaitu angka harapan hidup pada waktu lahir (*life expectancy at birth*), angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy life*) dan rata-rata lama sekolah (*means years of schooling*), dan kemampuan daya beli

(*purchasing power parity*). Indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, indikator angka melek huruf dewasa dan rata-rata lama sekolah mengukur pendidikan, dan indikator daya beli mengukur standar hidup. (Kuncoro, 2004)

**Tabel 1.1**  
**Ratio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Negara-Negara ASEAN**  
**Tahun 2010-2014**

Negara	Nilai Indeks Pembangunan Manusia					Rank (2014)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Singapore	0,897	0,903	0,905	0,909	0,912	11
Brunei Darussalam	0,843	0,847	0,852	0,852	0,856	31
Malaysia	0,769	0,772	0,774	0,777	0,779	60
Thailand	0,716	0,721	0,723	0,724	0,726	91
Indonesia	0,665	0,671	0,678	0,681	0,684	110
Filipina	0,654	0,653	0,657	0,664	0,668	115
Vietnam	0,653	0,657	0,660	0,663	0,666	117
Timor Leste	0,600	0,611	0,604	0,601	0,595	133
Laos	0,539	0,552	0,562	0,570	0,575	141
Kamboja	0,536	0,541	0,546	0,550	0,555	144

Sumber: *Human Development Report*, UNDP, 2015

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa negara Singapore menjadi negara teratas nilai Indeks Pembangunan Manusia dibandingkan negara-negara ASEAN yang lain, dengan menempati peringkat 11, sedangkan negara Kamboja menjadi negara terendah nilai Indeks Pembangunan Manusia dengan menempati peringkat 144 dari 188 negara yang dihitung oleh UNDP. Posisi Indonesia sendiri hanya ada di peringkat 110, dengan nilai 0,684 di tahun 2014 yang naik 0,004 dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 0,664.

Jika dilihat melalui Tabel 1.1, rangking Indeks Pembangunan Manusia

Indonesia masih sangat tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura dan Brunei Darussalam, bahkan dengan Malaysia. Muncul banyak pertanyaan mengapa Indonesia yang sejatinya memiliki sumber daya melimpah sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan perekonomian dan meningkatkan kualitas manusianya bisa memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia yang rendah. Jika di teliti lebih jauh lagi, menurut (*World Bank*, 2015), Singapura dan Brunei Darussalam memiliki pendapatan per kapita yang tinggi. Tahun 2014, pendapatan per kapita Singapura sebesar \$83.689 dan Brunei \$71.444, sedangkan pendapatan per kapita Indonesia hanya \$10.553.

Selain karena faktor pendapatan per kapita, Singapura juga diketahui merupakan salah satu negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan laporan *Transperancy International* tahun 2014, Indeks Persepsi Korupsi Singapura memiliki skor 84. Tidak ketinggalan dengan Singapura, Brunei Darussalam pun memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang cukup baik, yaitu 60. Jika suatu negara memiliki Indeks Persepsi Korupsi yang tinggi tentu saja hal tersebut mengindikasikan pemerintahan negara tersebut bersih. Pemerintahan yang bersih akan menimbulkan iklim investasi yang baik sehingga membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Adanya pertumbuhan ekonomi yang baik akan mendorong peningkatan pembangunan, tak terkecuali pembangunan manusia.

Rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia Indonesia juga tak terlepas

dari peran pemerintah yang belum maksimal, khususnya dibidang pendidikan dan kesehatan. Adanya kebijakan yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 menyatakan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari dana APBN dan APBD untuk memenuhi penyelenggaraan pendidikan nasional, nyatanya tidak dapat mendongkrak nilai Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program jaminan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah ini yang bertujuan meningkatkan taraf kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian. Masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia menjadi bukti nyata bahwa ketersediaan pangan, air bersih, sanitasi, energi, dan akses terhadap fasilitas kesehatan masih rendah.

UNDP memperkenalkan perhitungan IPM metode baru dengan beberapa perbedaan mendasar dibanding metode yang lama. Setidaknya, terdapat dua hal mendasar dalam perubahan metode baru ini. Kedua hal mendasar terdapat pada aspek indikator dan cara perhitungan indeks. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator baru pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*). Indikator ini digunakan untuk menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang memang saat ini sudah tidak relevan karena capaian di banyak negara sudah tinggi. UNDP juga menggunakan indikator PNP per kapita untuk menggantikan indikator PDB per kapita. Namun,

karena indikator PNP per kapita tidak tersedia di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS. Adanya perubahan indikator tersebut tak mengganti peranan Angka Harapan Hidup sebagai pengukuran dimensi kesehatan. (Badan Pusat Statistik, 2015).

**Tabel 1.2**  
**10 Provinsi di Indonesia dengan IPM Tertinggi**  
**Tahun 2015**

Rank	Provinsi	IPM
1	DKI Jakarta	78,99
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	77,59
3	Kalimantan Timur	74,17
4	Kepulauan Riau	73,75
5	Bali	73,27
6	Riau	70,84
7	Sulawesi Utara	70,39
8	Banten	70,27
9	Sumatera Barat	69,98
10	Sumatera Utara	69,51

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Kedaaan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah yang rendah dapat dibuktikan melalui Tabel 1.2 yang memperlihatkan provinsi yang memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia tertinggi di seluruh Provinsi di Indonesia, dan provinsi Jawa Tengah tidak berada di dalam rangking 10 besar tersebut. Hal ini menjadi perhatian mengapa provinsi yang memiliki sumber daya manusia besar seperti Jawa Tengah justru memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Angka Indeks Pembangunan Manusia Antar Provinsi se-Pulau Jawa**  
**Tahun 2010-2015**

Provinsi	2010	2011	Growth (%) 2011-2010	2012	Growth (%) 2011-2012	2013	Growth (%) 2012-2013	2014	Growth (%) 2013-2014	2015	Growth (%) 2014-2015
DKI Jakarta	76,31	76,98	0,88	77,53	0,71	78,08	0,71	78,39	0,40	78,99	0,77
DIY	75,37	75,93	0,74	76,15	0,29	76,44	0,38	76,81	0,48	77,59	1,02
Banten	67,54	68,22	1,01	68,92	1,03	69,47	0,80	69,89	0,60	70,27	0,54
Jawa Barat	66,15	66,64	0,85	67,32	0,97	68,25	1,38	68,70	0,81	69,50	1,02
Jawa Tengah	66,08	66,64	0,85	67,21	0,86	68,02	1,21	68,78	1,12	69,49	1,03
Jawa Timur	65,36	66,06	1,07	66,74	1,03	67,55	1,21	68,14	0,87	68,95	1,19

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Tabel 1.3 menunjukkan masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah jika dibandingkan dengan antar Provinsi se-Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah di tahun 2010 sebesar 66,08, atau menempati posisi ke 5 dari 6 provinsi di Pulau Jawa. Di tahun 2012, pertumbuhan indeks pembangunan manusia sebesar 0,85% , sedangkan angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah meningkat sebesar 66,64. Pertumbuhan di tahun 2012 sendiri memiliki angka pertumbuhan yang paling rendah, dimana pertumbuhan ini hanya sama dengan Provinsi Jawa Barat, namun tidak sebesar provinsi-provinsi lain.

Masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Manusia kembali tercermin di tahun 2013, dimana besaran angka Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah sebesar 67,21, namun jika dilihat secara besaran pertumbuhan, ada kenaikan sebesar 0,01% dari tahun 2012. Di tahun 2013, ada pertumbuhan sebesar 1,21% untuk angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah, dimana besaran pertumbuhan tersebut sama besarnya dengan Provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan yang cukup signifikan kembali terjadi di tahun 2014 serta 2015 untuk angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Namun, hal itu tetap menjadikan angka Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah masih rendah jika dibandingkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Secara lebih rinci, angka Indeks

Pembangunan Manusia menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah sebagai

berikut:

**Tabel 1.4**  
**Human Development Index (HDI)**  
**Kab/Kota di Jawa Tengah Tahun 2010-2015**

<b>Kab./Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kab. Cilacap	64,18	64,73	65,72	66,80	67,25	67,77
Kab. Banyumas	66,87	67,45	68,06	68,55	69,25	69,89
Kab. Purbalingga	63,61	64,33	64,94	65,53	66,23	67,03
Kab. Banjarnegara	60,70	61,58	62,29	62,84	63,15	64,73
Kab. Kebumen	63,08	64,05	64,47	64,86	65,67	66,87
Kab. Purworejo	68,16	69,11	69,40	69,77	70,12	70,37
Kab. Wonosobo	62,50	63,07	64,18	64,57	65,20	65,70
Kab. Magelang	63,28	64,16	64,75	65,86	66,35	67,13
Kab. Boyolali	68,76	69,14	69,51	69,81	70,34	71,74
Kab. Klaten	70,76	71,16	71,71	72,42	73,19	73,81
Kab. Sukoharjo	71,53	72,34	72,81	73,32	73,76	74,53
Kab. Wonogiri	63,90	64,75	65,75	66,40	66,77	67,76
Kab. Karanganyar	70,31	71,00	72,26	73,33	73,89	74,26
Kab. Sragen	67,67	68,12	68,91	69,95	70,52	71,10
Kab. Grobogan	64,56	65,41	66,39	67,43	67,77	68,05
Kab. Blora	63,02	63,88	64,70	65,37	65,84	66,22
Kab. Rembang	64,53	65,36	66,03	66,84	67,40	68,18
Kab. Pati	65,13	65,71	66,13	66,47	66,99	68,51
Kab. Kudus	69,22	69,89	70,57	71,58	72,00	72,72
Kab. Jepara	66,76	67,63	68,45	69,11	69,61	70,02
Kab. Demak	66,02	66,84	67,55	68,38	68,95	69,75
Kab. Semarang	69,58	70,35	70,88	71,29	71,65	71,89
Kab. Temanggung	63,08	64,14	64,91	65,52	65,97	67,07
Kab. Kendal	66,23	66,96	67,55	67,98	68,46	69,57
Kab. Batang	61,64	62,59	63,09	63,60	64,07	65,46
Kab. Pekalongan	63,75	64,72	65,33	66,26	66,98	67,40
Kab. Pemalang	58,64	59,66	60,78	61,81	62,35	63,70
Kab. Tegal	61,14	61,97	62,64	63,50	64,10	65,04
Kab. Brebes	59,49	60,51	60,92	61,87	62,55	63,18
Kota Magelang	73,99	74,47	75,00	75,29	75,79	76,39
Kota Surakarta	77,45	78,00	78,44	78,89	79,34	80,14

**Tabel 1.4 (lanjutan)**

<b>Kab./Kota</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Kota Salatiga	78,35	78,76	79,10	79,37	79,98	80,96
Kota Semarang	76,96	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23
Kota Pekalongan	68,95	69,54	69,95	70,82	71,53	72,69
Kota Tegal	69,33	70,03	70,68	71,44	72,20	72,96
<b>JAWA TENGAH</b>	<b>66,08</b>	<b>66,64</b>	<b>67,21</b>	<b>68,02</b>	<b>68,78</b>	<b>69,49</b>
<b>STD. DEVIASI</b>	<b>4,83</b>	<b>4,71</b>	<b>4,63</b>	<b>4,55</b>	<b>4,55</b>	<b>4,49</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah, 2015

Dari data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa trend Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2010 hingga 2015. Provinsi Jawa Tengah sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 1,04%, dalam kurun waktu 2014 hingga 2015. Kota Salatiga menjadi kota dengan nilai indeks pembangunan manusia tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Kota Salatiga, mempunyai nilai 80,96 pada tahun 2015 setelah di tahun 2014 mempunyai nilai sebesar 79,98. Sementara itu Kota Semarang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai 79,24 untuk tahun 2014, mengalami peningkatan 0,56% dari tahun sebelumnya, dan di tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 80,23. Kabupaten Brebes mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia 63,18 yang menjadi nilai terendah dari keseluruhan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Sementara itu, ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah terus mengalami penurunan. Dalam hal ini, ketimpangan diukur menggunakan standar deviasi, dimana tahun 2010

ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 4,83. Di tahun 2013 dan 2014, ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia tidak mengalami perubahan berarti, dimana ketimpangannya sebesar 4,55. Barulah di tahun 2015, ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia kembali turun menjadi 4,49.

Runtuhnya sistem Orde Baru membawa perubahan sistem pemerintahan menjadi terdesentralisasi. Hal ini membawa tanggung jawab yang besar bagi pemerintahan daerah untuk dapat mengelola keuangan daerah secara mandiri sehingga mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Disisi lain, desentralistik juga membawa hegemoni baru untuk dapat meningkatkan peran serta dari masyarakat di daerah otonom tersebut. Pendelegasian wewenang tersebut membawa pemerintah daerah untuk dapat menggali informasi-informasi tentang kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Informasi tersebut kemudian bisa dijadikan acuan bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola pengeluaran alokasi dananya.

Kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adanya peningkatan dana

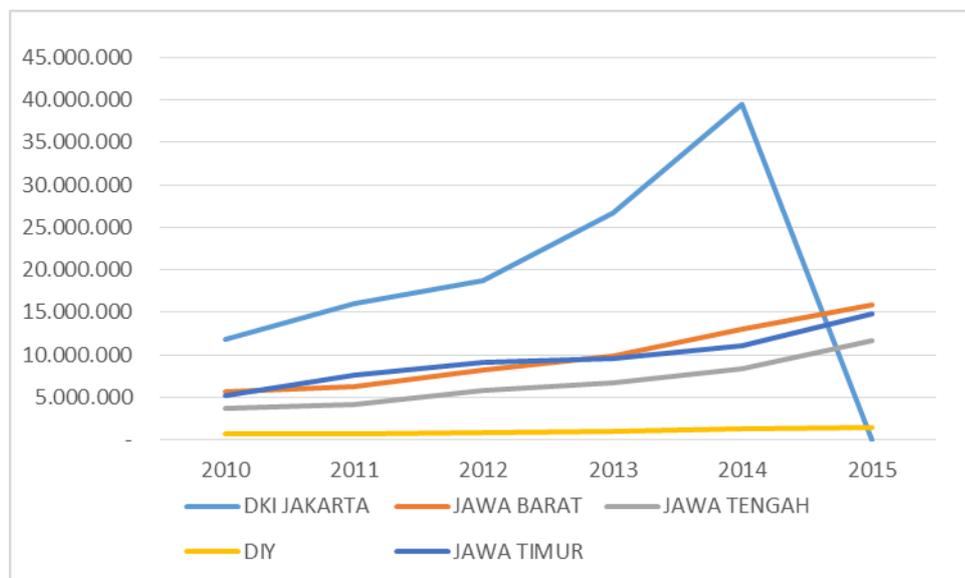
desentralisasi yang ditransfer pemerintah pusat setiap tahunnya diharapkan dapat mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. (Suyanto dalam Christy & Adi, 2009).

Menurut Musgrave (1993), ada 3 fungsi pemerintah, yaitu: (i) fungsi alokasi, yaitu penyediaan barang sosial atau proses pembagian keseluruhan sumber daya untuk digunakan sebagai barang sosial, (ii) fungsi distribusi, yaitu penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, (iii) fungsi stabilisasi, penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mempertahankan tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Adanya kebijakan desentralisasi memberikan kebebasan bagi daerah untuk mengontrol pembelanjanya secara mandiri serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di daerah otonomnya. Peningkatan PAD ini diharapkan dapat membiayai kebutuhan pemerintah daerah. Menurut Kuncoro (2004), untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber finansialnya sendiri. Salah satu pelaksanaan otonomi daerah dengan adanya desentralisasi fiskal yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah sesuai potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Secara teoritis,

pengukuran kemandirian daerah diukur dari pendapatan asli daerah. Sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah mencerminkan *local taxing power* bagi terwujudnya otonomi daerah yang luas.

**Gambar 1.1**  
**Perbandingan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah**  
**Antar Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah.

Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan oleh Gambar 1.1. Walaupun dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun secara kuantitas masih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, ataupun DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa masih rendahnya pemerintah Provinsi Jawa

Tengah dalam menggali potensi-potensi yang ada didalam daerah otonomnya.

**Tabel 1.5**  
**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>Growth (%)</b>
2010	3.729.062	-
2011	4.182.627	12,16
2012	5.799.955	38,67
2013	6.626.625	12,24
2014	8.347.875	25,99
2015	11.696.822	40,12

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, diolah

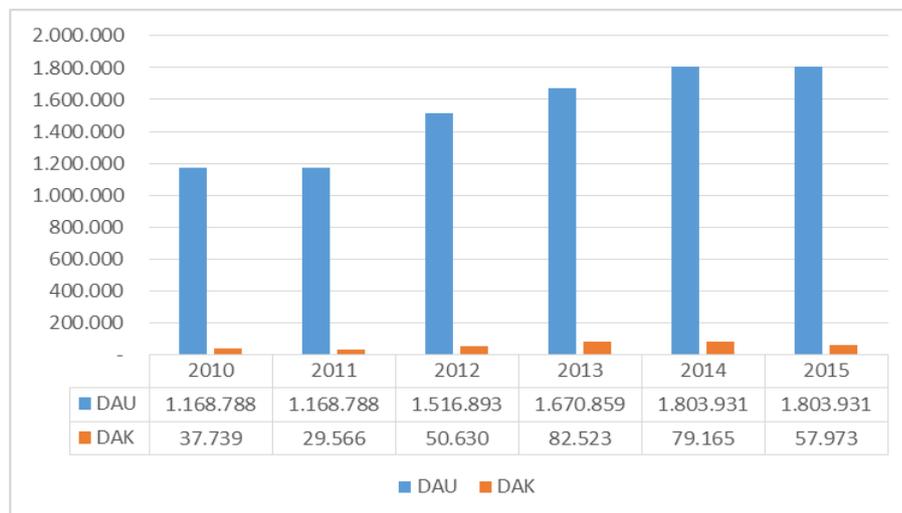
Dari Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selama kurun waktu 2010 hingga 2015 mengalami kondisi yang berfluktuasi. Di tahun 2010, Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 3.729.062 juta rupiah. Setahun berikutnya, terdapat pertumbuhan sebesar 12,16% dimana penerimaan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 4.182.627 juta rupiah. Pertumbuhan yang signifikan terjadi di tahun 2012, dimana pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah sebesar 38,67%. Namun di tahun 2013, terdapat penurunan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, sebesar 12,24%. Kondisi ini membuat Provinsi Jawa Tengah di tahun 2014 dan 2015 mengalami pertumbuhan yang terus membaik, dimana tahun 2014 nilai pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 25,99, sedangkan di tahun 2015 terdapat kenaikan sebesar 40,12%.

Namun menurut Kuncoro (2004), dalam realisasinya pendapatan asli daerah

hanya mampu membiayai pembelanjaan pemerintah maksimal sebesar 20%. Sejalan dengan hal tersebut, membawa implikasi adanya transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai tanggung jawab pemerintah pusat dalam penyelenggaraan desentralisasi fiskal, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 33/2004 sebagai revisi Undang-Undang No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perimbangan keuangan sendiri terdiri dalam Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

**Gambar 1.2**

**Laporan Realisasi Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015

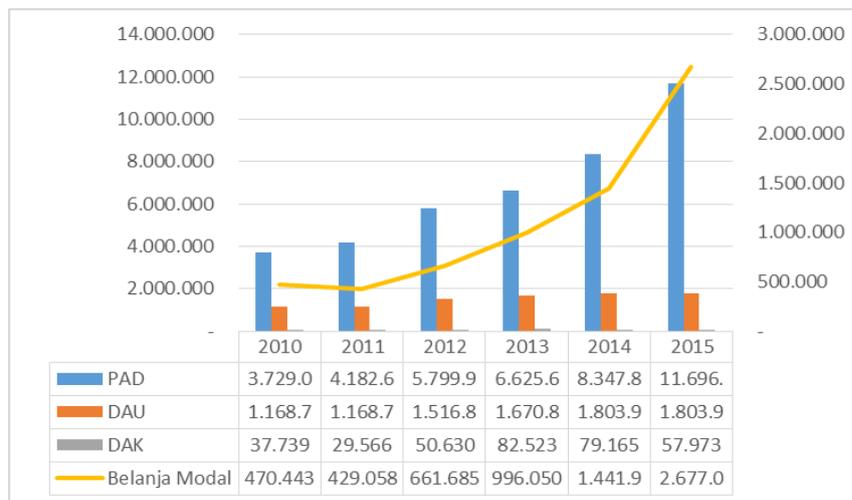
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa dana alokasi umum yang diterima oleh Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Di tahun 2010, Jawa Tengah

menerima dana alokasi umum sebesar 1.168.788 juta rupiah. Sedangkan di tahun 2014, Jawa Tengah menerima dana alokasi umum sebesar 1.803.931 juta rupiah. Selama kurun waktu lima tahu tersebut, penerimaan dana alokasi umum Jawa Tengah naik 635.143 juta rupiah, sedangkan dana alokasi khusus sendiri di tahun 2010 Jawa Tengah menerima 37.739 juta rupiah. Hingga tahun 2013, Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya dengan menerima 82.523 juta rupiah. Setahun berselang, dana tersebut turun 3.358 juta rupiah, menjadi sebesar 79.165 juta rupiah. Di tahun 2015, fenomena dana alokasi umum yang stagnan pun terjadi, dimana besaran dana alokasi umum Jawa Tengah sama seperti tahun sebelumnya sebesar 1.803.931 juta rupiah, sedangkan untuk fenomena dana alokasi khusus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang sebesar 79.165 turun menjadi 57.193 juta rupiah.

Adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik. Tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak tersedot untuk membiayai belanja lainnya (Yovita, 2011). Dana Alokasi umum merupakan dana dari APBN yang ditunjukkan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan ditetapkan berdasarkan *fiscal need* dan *fiscal capacity* dari suatu daerah. (Eko,

2011). Dana Alokasi Khusus cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Manurung dan Situngkir, 2009).

**Gambar 1.3**  
**Perkembangan PAD, DAU, DAK terhadap Alokasi Belanja Modal**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Gambar 1.3 juga memperlihatkan hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal. Di tahun 2010, terdapat fenomena bahwa adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum tidak mengubah komposisi belanja modal Provinsi Jawa Tengah dimana alokasi belanja modal mengalami penurunan. Penurunan tersebut juga terjadi pada penerimaan dana alokasi khusus. Namun dalam kurun waktu 2011 hingga 2015, alokasi belanja modal pemerintah Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan fenomena

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum Jawa Tengah. Fenomena penurunan penerimaan dana alokasi khusus Jawa Tengah dalam kurun waktu 2012 hingga 2015, tidak mengubah anggaran belanja modal yang terus semakin membesar.

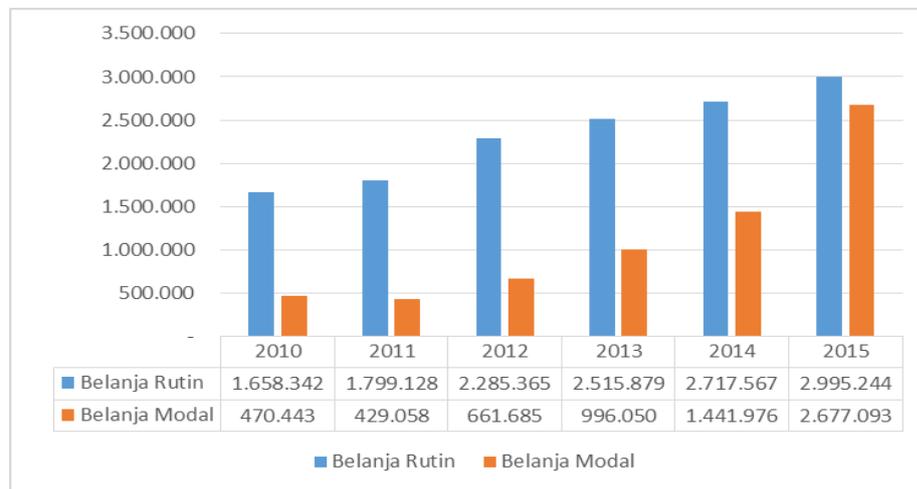
Hakikat dari hubungan antara otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada dasarnya merupakan pengejawantahan dari prinsip *money follow function*, yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan. Dalam implementasinya, seiring adanya penyerahan kewenangan kepada daerah, maka kepada daerah diberikan sumber-sumber pendanaan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Mekanisme pendanaan atas pelaksanaan kewenangan yang telah diserahkan ke daerah tersebut dilakukan melalui azas desentralisasi (Kementrian Keuangan, 2011).

Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja daerah tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu, 2005).

Adapun yang dimaksud dengan belanja rutin adalah belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, belanja subsidi, dan belanja lain-lain, sedangkan belanja pembangunan adalah belanja untuk pembiayaan proyek dan pembiayaan program. Pengklasifikasian menurut belanja rutin dan pembangunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan penekanan pada arti pentingnya anggaran pembangunan, yang dianggap memberikan dampak lebih besar. Namun, dalam pelaksanaannya, hal tersebut justru menimbulkan peluang terjadinya duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran (Kementerian Keuangan, 2014).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemerintah Daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik. (Mardiasmo, 2002)

**Gambar 1.4**  
**Perkembangan Belanja Rutin dan Belanja Modal Jawa Tengah**  
**Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)**



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2015

Dari Gambar 1.4 dapat diketahui bahwa perkembangan belanja rutin pemerintah Jawa Tengah lebih besar dibandingkan belanja modalnya. Bahkan, dalam tahun anggaran 2012, fenomena belanja modal pemerintah Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 470.443 juta rupiah menjadi 429.058 juta rupiah. Kendati demikian, fenomena tersebut tidak terjadi dengan anggaran belanja rutin, dimana setiap tahunnya belanja rutin pemerintah Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Di Tahun 2010, belanja rutin pemerintah Jawa Tengah sebesar 1.658.342 juta rupiah, dimana lima tahun kemudian belanja rutin tersebut mengalami kenaikan sebesar 1.059.225 juta rupiah sehingga menjadi 2.717.567 juta rupiah.

**Tabel 1.6**  
**Laporan Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2010-2015 (dalam jutaan rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Pengeluaran</b>	<b>Growth (%)</b>
<b>2010</b>	<b>470.443</b>	<b>-</b>
<b>2011</b>	<b>429.058</b>	<b>-8,80</b>
<b>2012</b>	<b>661.685</b>	<b>40,65</b>
<b>2013</b>	<b>996.050</b>	<b>50,53</b>
<b>2014</b>	<b>1.441.976</b>	<b>44,77</b>
<b>2015</b>	<b>2.677.093</b>	<b>85,65</b>

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diolah

Dari Tabel 1.6 dapat diketahui bahwa kondisi pengeluaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2010-2015 mengalami kondisi yang berkualitatif. Pada tahun 2010, pengeluaran Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah sebesar 470.443 juta rupiah. Terdapat penurunan besaran pengeluaran Belanja Modal di tahun 2011. Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan yang mengalami penurunan sebesar -8,80%. Pertumbuhan alokasi pengeluaran Belanja Modal terbesar terjadi di tahun 2015, dimana pertumbuhan di tahun tersebut sebesar 85,65%, dengan pengeluaran sebesar 2.677.093 juta rupiah.

Strategi alokasi pengeluaran daerah dalam bentuk belanja daerah memegang peranan yang begitu penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya, seperti pembenahan infrastruktur bidang

pendidikan, kendaraan publik, kesehatan yang menyebabkan masyarakat turut serta merasakan dampak positif dari pembenahan tersebut. Pengalokasian Belanja Modal berpedoman pada keperluan terhadap adanya infrastruktur yang layak demi memudahkan kegiatan operasional pemerintah serta sarana umum. Pengalokasian belanja seharusnya dilakukan secara efektif dan efisien untuk pemaksimalan mutu pemberian jasa kepada masyarakat (Andaiyani, 2012).

### ***1.2 Research Gap***

Darwanto dan Yulia (2007) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal serta penelitian yang dilakukan oleh Situngkir (2009) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pemkab Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Yovita (2011) tentang pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal serta Nurlis (2016) tentang "*The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia*" menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap alokasi Belanja Modal.

Penelitian Legrenzi dan Millas (2001) tentang “*Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities*” serta Situngkir dan Manurung (2009) tentang Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus pada Belanja Modal Kota dan Kabupaten Sumatera Utara menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Berbeda dengan hasil penelitian tersebut, penelitian Kusnandar dan Siswantoro (2012) tentang Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal serta penelitian Mawarni, Darwanis, dan Abdullah (2013) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi menyatakan bahwa variabel Dana Alokasi umum berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian Tuasikal (2008) tentang pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia serta Pelealu (2013) tentang Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado menunjukkan hasil bahwa variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil tersebut berbeda dengan temuan Pungky (2011) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus di Jawa Tengah serta Sumarmi (2012) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Provinsi D.I. Yogyakarta), dimana variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal.

Penelitian Oluwatobi dan Ogunrinola (2011) tentang *“Government Expenditure on Human Capital Development: Implication for Economic Growth in Nigeria”* serta Hukom (2015) tentang *“Effect of Capital Expenditures, Economic Growth, and Poverty on Human Development in Central Kalimantan”* menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hasil berbeda ditunjukkan oleh Udoh, Afangideh, dan Udeaja (2015) tentang *“Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Resource Development in Nigeria”* serta Dewi dan Supadmi (2016) tentang Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia yang menunjukkan hasil bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 1.7**  
***Research Gap***

No.	Permasalahan	<i>Research Gap</i>	Peneliti	Judul
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.	Darwanto dan Yulia (2007)  Situngkir (2009)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.  Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemkot/Pemkab Sumatera Utara.
		Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal.	Yovita (2011)  Nurlis (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi Indonesia 2008-2010)  <i>“The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia”</i>

**Tabel 1.7**  
***Research Gap (lanjutan)***

No.	Permasalahan	<i>Research Gap</i>	Peneliti	Judul
2.	Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal	Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal.	Legrenzi dan Millas (2001)  Situngkir dan Manurung (2009)	<i>“Non-Linear and Asymmetric Adjustment The Local Revenue-Expenditure Models: Some Evidence from The Italian Municipalities”</i>  Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus pada Belanja Modal Kota dan Kabupaten Sumatera Utara.
		Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal.	Kusnandar dan Siswantoro (2012)  Mawarni, Darwanis, dan Abdullah (2013)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

**Tabel 1.7**  
***Research Gap (lanjutan)***

No.	Permasalahan	<i>Research Gap</i>	Peneliti	Judul
3.	Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal	Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Alokasi	Tuasikal (2008)  Pelealu (2013)	Pengaruh DAU, DAK, PAD dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia  Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012
		Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Alokasi Belanja Modal	Pungky (2011)  Sumarmi (2012)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Kasus Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2002-2007).

**Tabel 1.7**  
**Research Gap (lanjutan)**

No.	Permasalahan	Research Gap	Peneliti	Judul
4.	Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Belanja Modal berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia	Oluwatobi dan Ogunrinola (2011) Hukom (2015)	<i>“Goverment Expenditure on Human Capital Development: Implication for Economic Growth in Nigeria.”</i>  <i>“Effect of Capital Expenditures, Economic Growth, and Poverty on Human Development in Central Kalimantan.”</i>
		Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusi	Udoh, Afangideh, dan Udeaja (2015)  Dewi dan Supadmi (2016)	<i>“Fiscal Decentralization, Ecnomic Growth, and Human Resource Development in Nigeria”</i>  Pengaruh Alokasi Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Indeks Pembangunan Manusia.

Sumber: Berbagai Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan

### **1.3 Rumusan Masalah**

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu induk perekonomian dengan memiliki jumlah sumber daya manusia yang besar di Indonesia. Otonomi daerah sendiri berprinsip adanya pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah guna adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dimasing-masing daerah. Selain menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat sebagai tanggung jawab atas pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan desentralisasi fiskal guna membantu keberlanjutan sistem pemerintahan di daerah. Hal ini didasari bahwa pemerintah daerah dinilai tidak dapat mencukupi kebutuhan belanja dengan bermodal Pendapatan Asli Daerah tersebut saja.

Dilihat dari sisi nilai Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Jawa Tengah masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, seperti Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Perlu adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah agar terus mengejar ketertinggalan nilai ini sehingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah dapat bersaing dengan provinsi-provinsi lain, salah satunya dengan pengalokasian belanja modal. Namun dalam kenyataannya, alokasi belanja modal di Provinsi Jawa Tengah terdapat fenomena bahwa alokasi belanja pemerintah lebih banyak untuk belanja rutin. Penelitian ini mencoba untuk

menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal?
2. Bagaimana pengaruh dana alokasi umum terhadap alokasi belanja modal?
3. Bagaimana pengaruh dana alokasi khusus terhadap alokasi belanja modal?
4. Bagaimana pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia?

#### **1.4 Tujuan dan Kegiatan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pada eks-Karisidenan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pada eks-Karisidenan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada eks-Karisidenan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh alokasi belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia pada eks-Karisidenan di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan bagi penulis dan untuk mempraktikkan ilmu yang sudah didapat.
2. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat menyumbangkan pemikiran tentang ekonomi publik, ekonomi pembangunan, dan desentralisasi fiskal.
3. Sebagai bahan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan guna mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama menjelaskan latar belakang permasalahan indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah, *research gap*, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab kedua menjelaskan landasan teoritis yang menjadi acuan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian.

### BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan definisi operasional variabel-variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode penganalisisan data.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat menjelaskan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum penelitian, hasil analisis data, serta interpretasi hasil dan pembahasan

### BAB V: PENUTUP

Bab kelima menjelaskan kesimpulan yang didapat dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan